

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**EVALUASI PROGRAM PELATIHAN PENGUATAN
KOMPETENSI PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN/KOTA PERIODE 2023-2028 PADA
PUSLITBANGDIKLAT BAWASLU**

Disusun Oleh :

Nama : Zahra Restu Devina

NPM : 2011011354

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2024**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**EVALUASI PROGRAM PELATIHAN PENGUATAN
KOMPETENSI PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN/KOTA PERIODE 2023-2028 PADA
PUSLITBANGDIKLAT BAWASLU**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan

Oleh:

Nama : Zahra Restu Devina

NPM : 2011011354

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN
DALAM UJIAN**

NAMA : ZAHRA RESTU DEVINA
NPM : 2011011354
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL : EVALUASI PROGRAM PELATIHAN
PENGUATAN KOMPETENSI PENGAWAS
PEMILU KAB/KOTA PERIODE 2023-2028 PADA
PUSLITBANGDIKLAT BAWASLU

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 15 Mei 2023

Pembimbing



Risky Yustiani Posumah, S.Sos., MPA

NIP. 198803262018012001

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024.

Ketua merangkap Anggota



(Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM)

Sekretaris merangkap Anggota

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

(Retnayu Prasetyanti, S.A.P., M.A.P)

Anggota

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by several loops and a horizontal line at the end.

(Risky Yustiani Posumah, S.Sos., M.P.A)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zahra Restu Devina
NPM : 2011011354
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Evaluasi Program Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 Pada Puslitbangdiklat Bawaslu” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 13 Mei 2024

Peneliti



Zahra Restu Devina

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Tugas Akhir ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Terapan Administrasi Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Ibu **Risky Yustiani Posumah, S.Sos., M.P.A** selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini. Selain itu, peneliti tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Seluruh dosen Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu dan dukungannya selama peneliti berkuliah;
3. Orangtua dan keluarga yang sangat peneliti cintai yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta dukungan moril maupun materil yang luar biasa selama ini kepada peneliti;
4. Bapak Rahmat Jaya Parlindungan Siregar selaku Plt. Kepala Puslitbangdiklat Bawaslu yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
5. Bapak Adie Iwa, Bapak Saepudin, Bapak Pramesta Widyapermana, dan Ibu Nistya Maharani yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber dan memberikan dukungannya kepada peneliti;
6. Seluruh pegawai Puslitbangdiklat Bawaslu yang telah banyak memberikan pengetahuan baru dan membantu peneliti dimulai dari magang, pelaksanaan proyek inovasi hingga penelitian skripsi;

7. Wijdaan Fikri yang selalu menghibur dan menemani peneliti dalam proses penyusunan skripsi;
8. Iput, Tania, Ica, Tesa, Iqlima, dan Tacik yang saling memberikan dukungan dan semangatnya satu sama lain dalam proses penyusunan skripsi;

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif serta membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik.

Jakarta, 13 Mei 2024

Peneliti,

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ZRD

ABSTRAK

Zahra Restu Devina (2011011354)

EVALUASI PROGRAM PELATIHAN PENGUATAN KOMPETENSI PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA PERIODE 2023-2028 PADA PUSLITBANGDIKLAT BAWASLU

Skripsi, xiv hlm, 81 halaman

Dosen Pembimbing: Risky Yustiani Posumah, S.Sos., M.P.A

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi program pelatihan penguatan kompetensi pengawas Pemilu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 pada Puslitbangdiklat Bawaslu. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pada evaluasi *context*, tujuan pelatihan diadakan untuk memberikan penyeragaman pemahaman kepada para jajaran pengawas Pemilu namun belum mampu untuk memastikan tingkat kompetensi peserta setelah mengikuti pelatihan. Untuk evaluasi *input*, diketahui bahwa pada indikator materi pelatihan dan kualifikasi instruktur telah berjalan dengan baik, sementara itu pada indikator kurikulum yang disusun belum terstandarisasi. Dalam evaluasi *process*, diketahui bahwa pada indikator metode pembelajaran telah berjalan dengan baik karena adanya beberapa metode yang diaplikasikan, sementara pada indikator uji kompetensi didapat peningkatan terhadap hasil post test yang dilakukan oleh peserta pelatihan. Untuk evaluasi *product*, pada indikator evaluasi dan pengawasan eksternal didapati belum terlaksana karena adanya tahapan Pemilu lain yang harus segera dilakukan, sedangkan indikator dukungan pasca pelatihan Puslitbangdiklat Bawaslu menyediakan bahan pembelajaran dalam bentuk *power point* (PPT) dan menyelenggarakan Puslitbangdiklat Expo. Pada indikator sertifikasi, diketahui bahwa sertifikat yang diberikan hanya sertifikat kelulusan dengan total 100% kelulusan dari peserta pelatihan. Solusi yang dapat diberikan yaitu perlu melibatkan para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan dan standarisasi kurikulum, mentoring dan kolaborasi antar widyaiswara, menentukan prioritas materi untuk didalami melalui program pelatihan, dan menetapkan pelatihan untuk diselenggarakan di luar tahapan proses Pemilu.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Model CIPP, Pelatihan Penguatan Kompetensi, Pengawas Pemilu, Bawaslu

ABSTRACT

Zahra Restu Devina (2011011354)

**EVALUATION OF TRAINING PROGRAM TO STRENGTHEN THE
COMPETENCE OF DISTRICT/CITY ELECTION SUPERVISORS FOR
PERIODE 2023-2028 AT PUSLITBANGDIKLAT BAWASLU**

Undergraduate Thesis, xiv, 81 pages

Supervisor: Risky Yustiani Posumah, S.Sos., M.P.A

The purpose of this study is to evaluate the training program to strengthen the competence of district / city election supervisors for the 2023-2028 period at the Puslitbangdiklat Bawaslu. The method used by researchers is a descriptive research method with a qualitative approach. The results of the research on context evaluation, the purpose of the training was held to provide uniformity of understanding to the ranks of election supervisors but has not been able to ensure the level of competence of participants after attending the training. For input evaluation, it is known that the indicators of training materials and instructor qualifications have been running well, while the curriculum indicators have not been standardized. In the process evaluation, it is known that the learning method indicator has been running well because of the several methods applied, while the competency test indicator shows an increase in the results of the post test conducted by the trainees. For product evaluation, it was found that the external evaluation and supervision indicators had not been carried out due to other election stages that had to be carried out immediately, while the post-training support indicator of Puslitbangdiklat Bawaslu provided learning materials in the form of power points (PPT) and organized the Puslitbangdiklat Expo. In the certification indicator, it is known that the certificates provided are only graduation certificates with a total of 100% graduation from the training participants. Solutions that can be provided are the need to involve experts, practitioners, and stakeholders in the process of curriculum development and standardization, mentoring and collaboration between widyaiswara, determining the priority of material to be explored through training programs, and determining training to be held outside the stages of the election process.

Keywords: Program Evaluation, CIPP Model, Competency Strengthening Training, Election Supervisor, Bawaslu

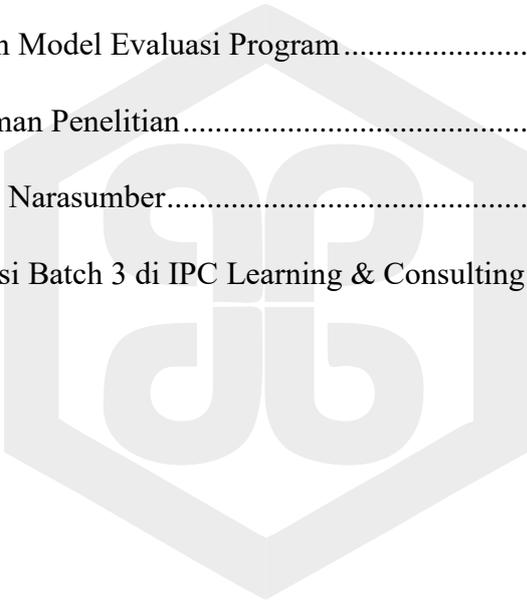
DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR FOTO	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori	8
B. Konsep Kunci.....	21
C. Kerangka Berpikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Metode Penelitian.....	24
B. Teknik Pengumpulan Data	25
C. Instrumen Penelitian.....	27
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN	31
A. Penyajian Data.....	31
B. Pembahasan.....	58
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	
Lampiran 2 Pedoman Studi Dokumentasi	
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	
Lampiran 4 Hasil Studi Dokumentasi	
Lampiran 5 Surat Pengantar Penelitian dari Politeknik STIA LAN Jakarta	
Lampiran 6 Surat Persetujuan Penelitian dari Puslitbangdiklat Bawaslu	
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dari Puslitbangdiklat Bawaslu	
Lampiran 8 Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme (turnitin)	
Lampiran 9 Riwayat Hidup Peneliti	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Skema Penyelenggaraan Pelatihan.....	5
Tabel 2. 1 Perbandingan Model Evaluasi Program.....	19
Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian.....	26
Tabel 4. 1 Daftar Nama Narasumber.....	43
Tabel 4. 2 Hasil Evaluasi Batch 3 di IPC Learning & Consulting.....	61



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

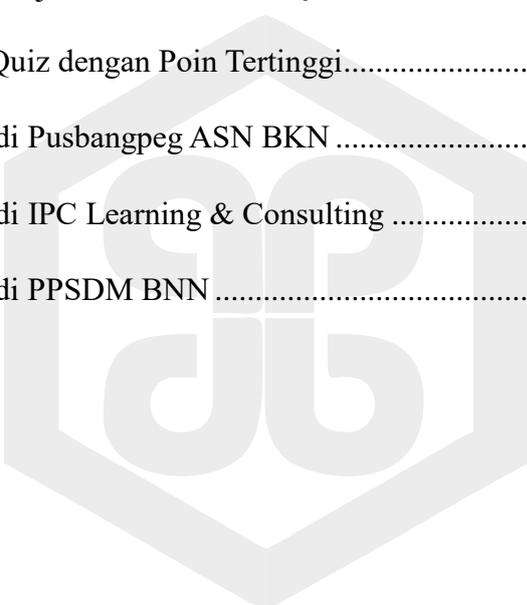
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Daftar Peserta Pelatihan	34
Gambar 4. 2 Struktur Kurikulum Penguatan Kompetensi	39
Gambar 4. 3 Formulir Evaluasi Pelatihan Batch IPC	41
Gambar 4. 4 Pre Test dan Post Test.....	48
Gambar 4. 5 Grup WhatsApp Peserta Pelatihan	53
Gambar 4. 6 Sertifikat Kelulusan Pelatihan.....	55

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR FOTO

Foto 4. 1 Metode Pembelajaran Outbond dan Quiz.....	44
Foto 4. 2 Tiga Peserta Quiz dengan Poin Tertinggi.....	45
Foto 4. 3 Ruang Kelas di Pusbangpeg ASN BKN	65
Foto 4. 4 Ruang Kelas di IPC Learning & Consulting	65
Foto 4. 5 Ruang Kelas di PPSDM BNN.....	66



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Terlaksananya pemilihan umum di Indonesia merupakan langkah politik yang mampu melahirkan sistem pemerintahan yang sah dan demokratis. Demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang mana penentuan kebijakan baik secara langsung ataupun tidak langsung, ditentukan oleh mayoritas suara rakyat yang memenuhi syarat melalui proses pemilihan umum (Asmawi dkk, 2021). Salah satu proses demokrasi dapat dikatakan baik adalah dengan adanya pengawasan yang dilakukan untuk mampu memberikan rasa percaya pada jalannya proses Pemilu. Pengawasan ini dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan Pemilu.

Bawaslu adalah lembaga pemerintah yang berperan penting saat proses demokrasi di Indonesia dengan didukung sumber daya manusia yang berkompeten sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan ketentuan yang menjadi dasar terbentuknya Bawaslu sebagai lembaga tetap dengan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Bawaslu diamanatkan sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu dan kode etik. Mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 3 dijelaskan pelaksana dan lingkup pengawasan. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap a) persiapan penyelenggaraan Pemilu, b) pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, c) netralitas aparatur sipil negara,

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, d) pelaksanaan putusan/keputusan, e) pelaksanaan Peraturan KPU; dan f) pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas Pemilu. Melihat pentingnya peran tersebut, maka perlu memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan sesuai prinsip dan asas dasar kepemiluan dalam sistem demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Saat memastikan bahwa tahapan pemilihan umum dapat terlaksana seperti peraturan yang telah dibuat, perlu adanya penguatan kapasitas dan kompetensi bagi pengawas Pemilu yang berperan dalam menjamin integritas dan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia. Bawaslu mencatat data pelanggaran Pemilu tahun 2019 dengan sebanyak 4.506 laporan, 18.995 temuan dengan dugaan pelanggaran administrasi sebanyak 16.427, terjadi 426 pelanggaran kode etik, 2.798 pelanggaran pidana, dan 1.518 pelanggaran hukum lainnya (Bawaslu, 2019)

Dalam rangka menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019, maka disusunlah Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk menyajikan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemilu berikutnya (Bawaslu, 2018). Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 upaya pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu yaitu:

1. Bekerja secara taktis dengan menggerakkan sumber daya struktural organisasi pengawas Pemilu untuk mencapai efektivitas pengawasan;
2. Memperkuat supervisi kepada jajaran pengawas Pemilu untuk memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu (Bawaslu, 2018).

Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang menetapkan pembentukan

Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan dan pengawasan Pemilu, serta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia dan pengawas Pemilu. Terbentuknya Puslitbangdiklat ini merupakan wujud dari Bawaslu untuk mengoptimalkan pengawasan dan memperkuat kompetensi pengawas Pemilu. Jajaran pengawas Pemilu yang berkompeten dapat menjadi aset pendukung terhadap kemajuan lembaga penyelenggara Pemilu. Untuk dapat menghasilkan anggota Bawaslu yang memiliki kompetensi, dalam hal ini adalah pengawas Pemilu, salah satu upayanya yakni melalui program pelatihan sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024.

Puslitbangdiklat merancang misi di bidang pendidikan dan pelatihan yaitu dengan membangun sistem pembelajaran pengawasan Pemilu yang inovatif dan berkelanjutan serta mengembangkan sumber daya manusia Bawaslu melalui pendidikan yang berkarakter dan pelatihan yang integratif. Sasaran dari diselenggarakannya pelatihan adalah penguatan kompetensi yang harus dibangun dan dimiliki oleh individu pengawas Pemilu, sehingga ditetapkan kompetensi-kompetensi sebagai indikator capaian dari pelatihan tersebut. Kompetensi ini terdiri dari:

1. Kompetensi dasar yang terdiri dari pemahaman tata kerja dan pola hubungan, pembinaan dan pengendalian, serta akuntabilitas kinerja;
2. Kompetensi Teknis yang terdiri dari teknis pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan advokasi hukum;
3. Kompetensi sosiokultural yang terdiri dari etika penyelenggara, kemampuan analisis sosial, komunikasi, pengembangan karakter, dan pengambilan keputusan, dan kompetensi terakhir;
4. Kompetensi khusus yang terdiri dari mekanisme pleno, mekanisme sidang penanganan pelanggaran, mekanisme adjudikasi, dan mekanisme mediasi (Puslitbangdiklat Bawaslu, 2023b).

Pelatihan menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan setiap organisasi dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Dengan adanya pelatihan penguatan kompetensi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja individu yang memiliki dampak positif pada produktivitas organisasi. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Noe (Nugroho, 2019) bahwa program pelatihan mengacu pada upaya yang direncanakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan fasilitas pengetahuan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan perilaku bagi anggota organisasi yang nantinya dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

Pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Puslitbangdiklat Bawaslu sebelumnya yaitu pelatihan penguatan kompetensi bagi pengawas Pemilu di tingkat Provinsi. Dalam pelaksanaannya masih berbentuk model pelatihan secara sosialisasi dan bimbingan teknis dengan waktu yang singkat serta masih banyak kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Ketika pelatihan tersebut dijalankan, proses evaluasi dilakukan secara terus menerus, sehingga adanya masukan dari berbagai pihak agar Puslitbangdiklat Bawaslu memiliki standar pelatihan yang menyeluruh. Kekurangan yang menjadi catatan bagi Puslitbangdiklat ini meliputi belum adanya standar pelaksanaan dalam bentuk desain pelatihan, peta jalan, kurikulum dan modul pelaksanaan pelatihan yang berstandar. Hal ini dikarenakan Puslitbangdiklat merupakan organisasi yang baru terbentuk pada tahun 2021 yang artinya baru menjalankan tugas dan fungsinya selama kurang lebih 3 tahun, sehingga program pelatihan yang dijalankan masih kurang maksimal. Kekurangan yang menjadi bahan evaluasi lainnya yaitu metode pembelajaran yang diadakan mulai pukul 09.00 pagi hingga 21.00 malam yang dianggap tidak efektif. Jam pengajaran yang terlalu lama dan dijadwalkan sampai malam hari menyebabkan pemahaman dan keterlibatan peserta pelatihan menjadi menurun, sehingga pelatihan pun menjadi kurang optimal. Jika kekurangan yang menjadi catatan dalam pelaksanaan pelatihan tidak segera diatasi, maka dampak yang mungkin terjadi

dapat mempengaruhi tingkat kemampuan dan kompetensi pengawas Pemilu yang mempengaruhi proses jalannya pemilihan umum ke depannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelatihan berikutnya yang diselenggarakan oleh Puslitbangdiklat Bawaslu yakni pelatihan penguatan kompetensi bagi pengawas Pemilu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 dan program pelatihan ini telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus sampai 6 September 2023. Pelatihan penguatan kompetensi pengawas Pemilu dilaksanakan dengan skema pembagian jadwal dan peserta sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Skema Penyelenggaraan Pelatihan

No	TEMPAT	TANGGAL			TOTAL
		Batch 1	Batch 2	Batch 3	
		23-27 Ags	28-1 Sept	2-6 Sept	
1	IPC Learning & Consulting	200	160	260	620
2	PPSDM BNN	100	100	0	200
3	Pusbangpeg ASN BKN	100	100	100	300
4	Hotel Green Forest	265	265	264	794
		665	625	624	1914

Sumber: Puslitbangdiklat Bawaslu, 2023b.

Dengan demikian, skema yang telah ditetapkan terkait standar mutu pelatihan dan penyelenggara pelatihan pada program pelatihan penguatan kompetensi pengawas Pemilu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 yang diselenggarakan oleh Puslitbangdiklat Bawaslu merupakan bentuk dari perbaikan pada saat pelatihan penguatan kompetensi pengawas Pemilu Provinsi. Namun, pada pelatihan ini belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai komponen-komponen yang ditetapkan dalam standar mutu pelatihan. Evaluasi yang telah dilakukan hanya evaluasi dari peserta pelatihan mengenai evaluasi pembelajaran, pengajar, kepanitiaan, sarana prasarana. Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh internal Puslitbangdiklat Bawaslu sendiri hanya sebatas evaluasi secara garis besar pelaksanaan pelatihannya saja, yang mana belum mengevaluasi dari tujuan

pelatihan, proses pelaksanaan, hingga pemberian sertifikasi sebagai bukti terhadap kualifikasi peserta pelatihan. Hal ini disebabkan oleh adanya prioritas lain yang lebih mendesak yang membuat Puslitbangdiklat Bawaslu harus memberikan perhatian lebih ke program kerja atau masalah yang butuh penanganan segera. Evaluasi program yang dilakukan ini guna menilai apakah program pelatihan berhasil memenuhi harapan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan atau tidak. Bersumber pada pernyataan Stufflebeam dan Shinkfield (Widoyoko, 2017) yang memaknai evaluasi sebagai proses menetapkan, memperoleh, dan memberikan informasi deskriptif serta penilaian tentang nilai dan keberhasilan tujuan suatu objek, desain, implementasi dan dampaknya untuk membimbing dalam pengambilan keputusan, memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban, dan menambah pemahaman terkait fenomena yang terlibat. Maksud pernyataan dari Stufflebeam dan Shinkfield ini yakni menjelaskan bahwa evaluasi dijadikan sebagai langkah untuk mendapatkan dan menyajikan informasi secara deskriptif serta menilai dari tujuan, desain, pelaksanaan dan dampak dari suatu objek untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Berkaitan dengan penjelasan yang telah disampaikan, maka dalam melakukan evaluasi program pelatihan penguatan kompetensi bagi pengawas Pemilu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 menggunakan pendekatan evaluasi model *Context, Input, Process, Product* (CIPP). Evaluasi model CIPP ini merupakan model yang ditawarkan oleh Stufflebeam pada tahun 1965. Dimensi pada model CIPP dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) *Context*, artinya hal yang menjadi latar belakang dalam perencanaan program; 2) *Input*, artinya masukan yang menjadi pendukung pada keberhasilan program; 3) *Process*, artinya pelaksanaan program dan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana; 4) *Product*, artinya hasil yang didapat pada pelaksanaan program (Purnomo dkk, 2020). Tujuan dari terbentuknya model ini bukan hanya untuk membuktikan melainkan untuk memperbaiki, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi dalam proses pengambilan keputusan (Chaerudin, 2019). Hal ini tentu sesuai dengan tujuan dari evaluasi yang akan dilakukan dalam program pelatihan yang dilaksanakan oleh

Puslitbangdiklat Bawaslu yang nantinya menjadi acuan dalam perbaikan terhadap skema standar mutu yang telah ditetapkan dan perbaikan pada pelaksanaan program pelatihan berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah masalah dalam penelitian ini yakni “Bagaimana pelaksanaan program Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 pada Puslitbangdiklat Bawaslu?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 pada Puslitbangdiklat Bawaslu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah dan pengetahuan lebih luas dalam mengembangkan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi program pelatihan pada instansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Puslitbangdiklat Bawaslu dalam perbaikan program Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu di masa mendatang agar dapat lebih optimal lagi dalam program pelatihan berikutnya.